



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 29 April 2026

Halaman: 2

Pemkot Identifikasi 33 Daycare Belum Berizin

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah melakukan identifikasi dengan menemukan sebanyak 33 daycare atau tempat penitipan anak di daerahnya yang belum mempunyai izin dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, menindaklanjuti adanya kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Pemkot telah melakukan razia seluruh tempat penitipan anak di Yogyakarta. "Dua hari ini kami sudah mulai razia tempat penitipan anak, dan sampai saat ini sudah kita dapatkan ada 37 daycare-daycare yang berizin dan juga ada 33 daycare lainnya yang belum berizin," katanya di Yogyakarta, Selasa (28/4).

Menurut Hasto, terhadap daycare yang belum berizin tersebut yang nantinya akan dilakukan audit terus menerus, karena tidak menutup kemungkinan data daycare akan terus bertambah. "Dan tentu ini sebagai satu pembelajaran bersama lintas sektor kita untuk kemudian bagaimana regulasi ke depan harus lebih baik lagi," ujarnya.

Wali Kota mengatakan, identifikasi

daycare termasuk memastikan perizinan tempat penitipan anak tersebut menjadi langkah pemkot yang sangat darurat akut, hal itu guna menyediakan lembaga yang amanah dan terpercaya bagi masyarakat. "Nah kita sadari betul bahwa anak-anak yang menjadi korban ini bagaimana dititipkan ke tempat penitipan anak atau daycare yang lain. Ini menjadi sesuatu yang sangat emergency, karena orang tua, dua-duanya pada punya pekerjaan," ujarnya.

Menurutnya, dari hasil identifikasi terhadap daycare tersebut setidaknya sebanyak 15 daycare atau tempat penitipan anak lainnya yang ada di sekitar Yogyakarta dan bisa menampung hingga berjumlah 78 anak. "Dan kami memutuskan untuk pembiayaan sampai akhir semester ini kami dari pemerintah kota bisa menanggung hal tersebut, termasuk untuk memberikan pendampingan, dan pembi-

ayaan kepada korban," ujarnya.

Dia mengatakan, hal tersebut menjadi penekanan Pemkot, karena anak-anak yang menjadi korban ini secara akut memang membutuhkan pendampingan secara psikologis, termasuk melakukan penilaian terhadap gangguan tumbuh kembang anak.

Hal tersebut, lanjut Wali Kota, karena berdasarkan hasil audiensi pemkot dengan keluarga korban, banyak sekali yang dilaporkan tentang gangguan-gangguan tumbuh kembang anak, termasuk stunting dan sebagainya. "Sehingga selain masalah psikis, kami harus juga melakukan pemeriksaan secara fisik, sehingga gangguan fisik yang ada juga harus kami tangani bersama dokter anak dan dokter dokter ahli tumbuh kembang anak," katanya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) RI menyebut bahwa kasus kekerasan dan penelantaran terhadap anak di salah satu daycare di Kota Yogyakarta merupakan kasus daycare bermasalah terbesar yang ditangani lembaganya dalam tiga tahun terakhir. "Kami mendata ini adalah pengaduan yang kelima untuk kasus daycare bermasalah sejak tiga tahun terakhir di seluruh Indonesia. Dan ini

termasuk kasus yang luar biasa yang ditangani Polresta Yogyakarta," kata Komisioner KPAI Diyah Puspitarini saat konferensi pers di Polresta Yogyakarta, Senin (27/4).

Menurutnya, kasus kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta menjadi aduan yang kelima selama tiga tahun, menjadi kasus yang besar karena jumlah korban dan 13 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. "Dan kami apresiasi KPAI Yogyakarta, juga Pemda DIY serta semua pihak dan Wali Kota Yogyakarta, karena dari kasus yang KPAI tangani, jumlah korban ini yang paling banyak di seluruh Indonesia," katanya.

Dia mengatakan, kasus daycare bermasalah sebelumnya ada di Depok Jawa Barat, kemudian daycare di Pekanbaru Riau, setelah itu daycare bermasalah di Tebet Jakarta Timur, dan daycare bermasalah di Jakarta Selatan, serta daycare di Yogyakarta ini merupakan yang kelima. "KPAI berharap bahwa sesuai undang-undang perlindungan anak, pertama proses hukum harus cepat, kedua anak-anak harus mendapat perlindungan," katanya. (*)-d

DEKORASI LIDN 2026

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 13 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005